

ABSTRAK

Perjalanan dinas merupakan suatu perjalanan yang bertujuan untuk menunjang suatu kepentingan publik dan tujuan bersama, menuju satu lokasi dilaksanakannya agenda penting. Perjalanan dinas bersifat wajib dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Guna tercapainya perjalanan dinas, disediakanlah sejumlah dana untuk keperluan belanja dalam anggaran. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Timur . Instansi ini beralamatkan di Jalan Soeharto Nomor 44, Sumba Timur. Objek penelitian ini adalah pembayaran biaya perjalanan dinas. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Dari proses pengumpulan data diperoleh informasi bahwa terdapat subsistem penunjukan pelaksana perjalanan dinas, pembayaran uang muka kerja, dan penyelesaian serta pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas. Prosedur yang membentuk sistem ditampilkan dengan bagan alir (flowchart). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran biaya perjalanan dinas pada instansi ini sudah cukup baik tetapi masih terdapat ketidaksesuaian pada prosedurnya. Masih ada beberapa hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan sistem yang tak ada di SOP, dan temuan ketidaksamaannya dengan Peraturan Menteri Keuangan. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya kontrol pelaksana perjalanan dinas, adanya pembaharuan SOP yang sesuai dengan yang dilakukan, serta sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai.

ABSTRACT

Business Trip is a journey that aims to support a public interest and a common goal, heading to the location in which the important agenda is going to take place.. Business Trip is mandatory and is related to the execution of tasks and functions of the work unit. In order to be successful, a number of funds are provided for expenditure purposes in the budget. This research is conducted at the Regional House of Representatives Secretariat of East Sumba District located on Soeharto Street. No. 44, East Sumba. The object of this research is the payment of Business Trip expenses. Observation, interviews, and documentation are carried out to collect data. Data analysis method used is qualitative. From the data collection process, it is obtained that there is a subsystem for the appointment of executors on Business Trip, payment of work advances, and completion and accountability of Business Trip expenses. The procedure is displayed with a flowchart. The results of the research show that the payment system for Business Trip expenses in this agency is good enough but there are still discrepancies in the procedure. There are still a number of things that have not been regulated in the Standard Operating Procedure (SOP), the implementation of the system that is not found the SOP, and the findings of discrepancy with the Regulations of the Minister of Finance. It is suggested that there should be the implementation of Business Trip control, the SOP renewal in accordance with what is done, and socialization of the SOP to all employees.